

WARUNG KOPI SEBAGAI RUANG POLITIK AKAR RUMPUT: ANALISIS STREET-LEVEL POLITICS DALAM DEMOKRASI INDONESIA

Arwan Aras^{1*}, Ariana Yunus², Ali Armunanto³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Korespondensi: arwanarast@gmail.com

Citation (APA):

Aras, A., Yunus, A., & Armunanto, A. (2026). Warung Kopi Sebagai Ruang Politik Akar Rumput: Analisis Street-Level Politics dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 52–61. <https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5587>

Email Authors:

arwanarast@gmail.com
ariana@unhas.ac.id
armunanto@unhas.ac.id

Submitted: 16 Februari, 2026

Accepted: 03 Mei, 2026

Published: 28 Mei, 2025

Copyright © 2026 Arwan Aras, Ariana Yunus, Ali Armunanto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Warung Kopi (Warkop) sebagai ruang politik informal yang merefleksikan praktik demokrasi dari bawah di Indonesia. Warkop tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, tetapi juga menjadi arena percakapan politik yang berlangsung secara spontan dan relatif egaliter di antara masyarakat dari beragam latar belakang. Meskipun demikian, keterkaitan antara pertukaran gagasan politik di ruang ini dengan praktik patronase dan klientelisme lokal masih belum banyak dibahas secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur analitis dengan mensintesis berbagai sumber dan data sekunder mengenai dinamika politik di ruang sosial non-formal, dengan fokus pada praktik politik keseharian dan relasi kekuasaan berbasis jaringan personal. Hasil analisis menunjukkan adanya dualitas fungsi Warkop, yaitu sebagai ruang pertukaran informasi, pembentukan opini publik, dan penguatan jejaring sosial-politik warga, sekaligus sebagai medium bagi elite lokal untuk memediasi, membangun, dan mempertahankan praktik patronase. Temuan ini menegaskan bahwa Warkop merupakan ruang demokrasi akar rumput yang bersifat ambigu, karena di satu sisi mendorong partisipasi politik, namun di sisi lain turut mereproduksi relasi kekuasaan yang transaksional.

Kata kunci: Warung Kopi; *Street-Level Politics*; Politik Akar Rumput; Patronase; Demokrasi Indonesia.

ABSTRACT

This study examines coffee stalls (Warkop) as informal political spaces that reflect grassroots democratic practices in Indonesia. Warkop functions not only as a site of everyday social interaction but also as an arena for spontaneous and relatively egalitarian political discussions among people from diverse backgrounds. However, the relationship between the exchange of political ideas in these spaces and local practices of patronage and clientelism remains underexplored. This study employs an analytical literature review method by synthesizing various sources and secondary data on political dynamics in informal social spaces, with a focus on everyday political practices and power relations based on personal networks. The findings reveal a dual function of Warkop: on the one hand, it serves as a space for information exchange, public opinion formation, and the strengthening of socio-political networks among citizens; on the other hand, it acts as a medium for local elites to mediate, build, and sustain patronage practices. These findings suggest that Warkop represents an ambiguous form of grassroots democracy, as it encourages political participation while simultaneously reproducing transactional power relations.

Keywords: Coffee Shop; *Street Level Politics*; *Grassroots Politics*; Patronage; Democracy Indonesia

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia pascareformasi 1998 telah melahirkan dinamika politik yang kompleks dan penuh tantangan di tengah konsolidasi institusi-institusi demokrasi formal, justru ruang-ruang informal yang semakin menentukan denyut nadi politik praktis. Selama ini, analisis demokrasi Indonesia cenderung terfokus pada dinamika di tingkat elite konflik di parlemen, kinerja partai politik, dan kontestasi pemilu

sementara sebuah arena politik yang lebih organik justru berkembang di warung-warung kopi yang tersebar di seluruh Nusantara. Narasi besar demokratisasi Indonesia, dengan demikian, tidak hanya ditulis dalam gedung-gedung DPRD, tetapi juga direkam dalam obrolan-obrolan santai di antara denting cangkir dan kepulan asap rokok di warung kopi.

Setelah lebih dari dua dekade reformasi, kegelisahan akademik baru muncul dalam studi demokrasi Indonesia. Survei LSI Denny JA (2023) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik konsisten berada di level terendah, sementara menurut Indikator Politik Indonesia (2023), ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi formal mencapai 65%. Fenomena ini melahirkan apa yang ditulis oleh Hadiz (2010) dalam "*Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*" disebut sebagai "oligarki" yang justru menguasai kanal-kanal demokrasi formal. Dalam kondisi seperti inilah, ruang-ruang alternatif yang berada di luar kendali langsung oligarki menjadi semakin penting, dan warung kopi muncul sebagai salah satu ruang alternatif yang paling signifikan.

Warung kopi atau yang dikenal dengan berbagai nama seperti angkringan di Yogyakarta, kios kopi di Medan, atau warung kopi di Makassar, telah lama menjadi institusi sosial yang mengakar dalam budaya Indonesia. Namun, transformasinya menjadi arena politik masih kurang mendapat perhatian akademis yang memadai. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih kuat tradisi lisan dan komunikasi tatap muka, warkop berperan sebagai semacam "agora" modern ruang publik tempat warga tidak hanya bertukar informasi sehari-hari, tetapi juga membentuk opini kolektif tentang isu-isu politik. Sebagaimana diungkapkan oleh Habermas (1989) dalam "*The Structural Transformation of the Public Sphere*", ruang publik yang ideal adalah tempat di mana warga dapat berdiskusi secara rasional untuk membentuk opini publik.

Tinjauan kritis terhadap literatur yang ada mengidentifikasi tiga celah penulisan yang signifikan. Secara teoretis, belum terdapat upaya sistematis untuk memadukan kerangka *street-level politics* (Chatterjee, 2004) yang melihat partisipasi egaliter dengan teori patronase-klientelisme (Kitschelt & Wilkinson, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2016) dalam menganalisis fenomena warkop. Selain itu, studi-studi yang ada cenderung terfragmentasi dalam berbagai studi kasus tanpa sintesis komparatif yang komprehensif, sehingga meninggalkan celah metodologis. Kekurangan ini turut menghasilkan celah analitis, yaitu minimnya analisis kritis tentang paradoks warkop sebagai ruang egaliter sekaligus arena relasi kuasa yang timpang yang perlu dikaji secara mendalam.

Artikel ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan Penulisan: (1) Bagaimana kerangka *street-level politics* dan teori patronase-klientelisme dapat menjelaskan fungsi ganda warung kopi sebagai ruang diskursus egaliter sekaligus arena relasi kuasa dalam konteks demokrasi Indonesia? (2) Dalam bentuk dan mekanisme apa saja partisipasi politik, pertukaran simbolik, dan praktik mobilisasi dukungan tersebut termanifestasi dalam interaksi sosial di warung kopi? (3) Sejauh mana warung kopi dapat dikonseptualisasikan sebagai 'ruang publik alternatif' (*alternative public sphere*) yang merepresentasikan model *democracy from below*, sekaligus mereproduksi batasan-batasan tertentu?

Penulisan ini menggunakan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Kerangka analisis mengintegrasikan tiga perspektif

teoretis: *street-level politics* (Chatterjee, 2004); patronase dan klientelisme (Kitschelt & Wilkinson, 2007; Aspinall & Sukmajati, 2016); dan kritik ruang publik (Fraser, 1990) tentang *subaltern counterpublics*.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, artikel ini menegaskan bahwa warung kopi merepresentasikan mikrokosmos demokrasi Indonesia yang sesungguhnya sebuah ruang hibrid tempat partisipasi egaliter dan relasi patronase beririsan, tempat diskursus rasional dan mobilisasi klientelistik berdialektika. Pemahaman mendalam tentang dinamika ruang ini penting untuk mengembangkan model demokrasi yang berakar pada konteks sosio-kultural di Indonesia.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui metode studi kepustakaan (library research) atau meta-sintesis literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi makna, proses sosial, dan konteks yang melatarinya (Creswell, 2014), sedangkan metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2019). Penulisan ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang berasal dari 22 sumber literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, laporan survei, dan hasil penelitian terdahulu. Dari keseluruhan sumber tersebut, sebanyak 15 literatur merupakan terbitan 10 tahun terakhir (2016–2025), sedangkan 7 literatur lainnya merupakan sumber di atas 10 tahun yang tetap digunakan karena memiliki relevansi teoretis dan konseptual yang kuat, terutama terkait teori ruang publik, *street-level politics*, dan patronase-klientelisme. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tema, kekuatan empiris, dan keterkaitannya dengan kajian ruang publik informal, demokrasi lokal, serta praktik politik informal di Indonesia. Sumber yang dianalisis mencakup berbagai studi mengenai Warung Kopi (Warkop) sebagai ruang sosial-politik di sejumlah wilayah Indonesia seperti Makassar, Parepare, Surabaya, Banda Aceh, dan Kepulauan Riau. Proses analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) interpretatif untuk mengidentifikasi pola interaksi politik, pembentukan opini publik, praktik patronase, dan bentuk partisipasi *democracy from below* dalam ruang informal masyarakat. Analisis isi digunakan untuk menemukan tema, pola, dan makna yang muncul dalam dokumen atau literatur yang dikaji (Krippendorff, 2018). Selanjutnya, analisis komparatif konseptual diterapkan untuk membandingkan berbagai temuan empiris dari setiap wilayah guna menemukan persamaan maupun perbedaan praktik politik informal berdasarkan konteks sosial-budaya yang berbeda. Hasil analisis tersebut kemudian diintegrasikan dengan kerangka teoretis *street-level politics* dan patronase-klientelisme sehingga penulisan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan penjelasan konseptual mengenai peran Warkop sebagai ruang sosial-politik dalam demokrasi Indonesia pascareformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini menyajikan analisis mendalam mengenai peran Warung Kopi (Warkop) sebagai ruang politik informal di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teoretis *street-level politics* serta didukung oleh perspektif patronase dan klientelisme yang telah dijelaskan dalam bagian metodologi. Kerangka ini digunakan untuk membaca bagaimana praktik politik tidak hanya berlangsung dalam institusi formal, tetapi juga dalam ruang-ruang sosial keseharian yang bersifat informal, cair, dan berbasis interaksi langsung antarwarga.

Dalam konteks tersebut, Warkop diposisikan sebagai arena sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi biasa, tetapi juga sebagai ruang produksi makna politik di tingkat akar rumput. Melalui pendekatan *street-level politics*, pembahasan ini menekankan bahwa praktik politik warga tidak selalu muncul dalam bentuk partisipasi formal seperti pemilu atau organisasi politik, tetapi juga hadir dalam percakapan sehari-hari, pertukaran informasi, serta pembentukan opini publik di ruang-ruang informal seperti Warkop.

Lebih lanjut, pembahasan ini juga mengaitkan dinamika tersebut dengan praktik patronase dan klientelisme yang bekerja melalui relasi sosial yang bersifat personal dan berulang. Dengan demikian, Warkop tidak hanya menjadi ruang diskursus egaliter, tetapi juga berpotensi menjadi arena di mana relasi kuasa dinegosiasikan melalui interaksi sosial yang tampak sederhana, namun memiliki implikasi politik yang signifikan.

Berdasarkan kerangka tersebut, bagian ini akan menguraikan temuan-temuan utama dari berbagai literatur terpilih untuk menjawab pertanyaan penulisan, khususnya terkait bagaimana Warkop berfungsi sebagai ruang politik hibrid yang menggabungkan logika partisipasi akar rumput dengan praktik relasi kuasa berbasis patronase.

Warung Kopi sebagai Ruang *Street-level politics*

Perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi dicirikan oleh munculnya ruang sosial informal yang melengkapi fungsi institusi politik formal. Pendekatan *street-level politics* (Chatterjee, 2004) menjadi kunci untuk memahami fenomena ini karena menyoroti bahwa politik akar rumput (*grassroots politics*) lahir dari aktivitas sosial sehari-hari. Warga, melalui interaksi di ruang-ruang informal seperti Warkop, bertransformasi dari sekadar penerima kebijakan menjadi pelaku aktif dalam proses politik (Azizah, 2024). Dalam konteks ini, Warung Kopi merupakan salah satu bentuk ruang informal yang paling representatif.

Warkop yang juga dikenal sebagai kedai kopi, angkringan, atau kios kopi, berfungsi sebagai arena sosial di mana percakapan lintas kelas sosial berlangsung secara egaliter. Sifatnya yang terbuka dan tidak hierarkis memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berdialog tanpa batasan status sosial (Ekayanta, 2022). Obrolan ringan sering kali berkembang menjadi diskusi mengenai isu sosial dan politik, menjadikannya pusat diskursus warga yang berperan penting dalam penyebaran informasi publik (Habibi, 2018; Sari, 2018). Kajian-kajian empiris di Makassar (Ardiansyah, 2021) dan Surabaya (Wijayanti, 2022) menunjukkan bahwa Warkop menjadi lokasi strategis untuk pembentukan persepsi publik terhadap kandidat politik. Melalui lensa *street-level politics*, Warkop terbukti sebagai ruang nyata di mana partisipasi politik warga tumbuh secara alami, menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang dari bawah. Namun, posisi Warkop sebagai pusat diskursus egaliter juga menghadapi tantangan kritis. Sifatnya yang seringkali homogen secara ideologis atau sosial berpotensi mengubahnya menjadi ruang gema (*echo chamber*). Di ruang ini, informasi yang beredar cenderung memperkuat keyakinan yang sudah ada. Lebih jauh, penyebaran informasi informal di Warkop, tanpa melalui mekanisme verifikasi media formal, menjadikannya arena yang rentan terhadap penyebaran misinformasi politik.

Namun, jika dilihat lebih dalam, Warkop tidak bisa hanya dipahami sebagai ruang diskusi yang benar-benar egaliter. Dalam praktiknya, percakapan yang terjadi di dalamnya sering kali mengikuti pola

interaksi sosial yang sudah ada di masyarakat. Artinya, meskipun semua orang bisa berbicara, tidak semua suara memiliki pengaruh yang sama. Biasanya ada individu tertentu yang lebih dominan dalam diskusi, baik karena pengalaman, status sosial, atau sekadar karena lebih sering berada di ruang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan dalam Warkop lebih bersifat situasional, bukan mutlak.

Di sisi lain, proses penyebaran informasi di Warkop juga berlangsung sangat cepat, tetapi tidak selalu melalui mekanisme verifikasi yang jelas. Informasi politik yang dibicarakan sering kali berasal dari berita media, pengalaman pribadi, atau bahkan cerita dari orang lain yang belum tentu akurat. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan antarindividu menjadi faktor utama dalam menentukan apakah suatu informasi dianggap benar atau tidak. Akibatnya, Warkop bisa menjadi ruang yang mempercepat penyebaran informasi politik, tetapi sekaligus juga membuka peluang terjadinya kesalahpahaman atau misinformasi.

Selain itu, percakapan yang terjadi di Warkop juga tidak jarang berkembang menjadi pembentukan sikap politik bersama. Obrolan yang awalnya santai bisa mengarah pada dukungan atau penolakan terhadap isu atau tokoh politik tertentu. Proses ini biasanya tidak terstruktur, tetapi terbentuk secara perlahan melalui interaksi yang berulang. Dengan cara ini, Warkop dapat dilihat sebagai ruang yang ikut memengaruhi cara warga membentuk opini politik mereka, meskipun tidak secara langsung.

Secara keseluruhan, Warkop memperlihatkan bahwa praktik *street-level politics* tidak hanya soal partisipasi warga dalam arti formal, tetapi juga bagaimana politik hadir dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sifatnya yang terbuka dan tidak terkontrol juga membuat ruang ini memiliki sisi yang kompleks, karena di dalamnya terdapat potensi partisipasi sekaligus bias informasi yang berjalan bersamaan.

Pola Patronase dan Klientelisme di Ruang Warung Kopi

Setelah menegaskan peran Warkop sebagai ruang *street-level politics*, pembahasan ini berfokus pada bagaimana dinamika patronase dan klientelisme bekerja di dalamnya. Menurut Kitschelt dan Wilkinson (2007), patronase dan klientelisme merujuk pada relasi pertukaran antara aktor yang memiliki akses terhadap sumber daya (patron) dan individu yang membutuhkan dukungan atau manfaat tertentu (klien), yang dimediasi oleh loyalitas politik. Dalam konteks Indonesia, relasi ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kedekatan sosial dan ikatan personal yang bersifat jangka panjang.

Warkop menjadi ruang yang strategis dalam proses tersebut karena karakteristiknya yang terbuka, santai, dan tidak formal. Ruang ini memungkinkan interaksi berulang antara aktor politik lokal dan warga, sehingga relasi sosial dapat dibangun secara perlahan dan tampak alami. Dalam banyak kasus, praktik patronase tidak hadir dalam bentuk yang eksplisit seperti politik uang, tetapi disamarkan melalui interaksi sehari-hari yang bersifat informal dan simbolik. Tindakan sederhana seperti mentraktir kopi, rokok, atau membantu kebutuhan kecil warga menjadi bagian dari mekanisme pertukaran yang membangun rasa utang budi (*debt of gratitude*), yang kemudian dapat dikonversi menjadi dukungan politik pada momen elektoral.

Lebih jauh, Warkop dapat dipahami sebagai ruang produksi dan reproduksi relasi klientelistis. Interaksi yang berulang di ruang ini memungkinkan patron untuk mengakumulasi modal sosial melalui

kedekatan emosional dan keakraban, bukan semata-mata melalui program politik formal. Dengan cara ini, kekuasaan tidak selalu tampil dalam bentuk dominasi langsung, tetapi bekerja melalui normalisasi hubungan sosial yang tampak wajar dalam kehidupan sehari-hari. Relasi patron-klien menjadi kabur karena dibungkus dalam bahasa pertemanan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial.

Temuan empiris dari berbagai konteks lokal menunjukkan pola yang konsisten bahwa Warkop berfungsi sebagai titik temu antara aktor politik dan masyarakat (Rahmawati, 2020; Anisaturrahmah & Ubaidullah, 2025). Namun demikian, terdapat variasi dalam intensitas dan bentuk relasi politik yang terbentuk. Di wilayah urban, hubungan politik cenderung lebih terstruktur dan berbasis jaringan elite, sedangkan di wilayah regional atau perifer relasi lebih bersifat personal dan langsung, dengan keterlibatan tokoh lokal yang lebih dominan dalam membangun kedekatan politik (Tomsa & Setijadi, 2018; Berenschot, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Warkop tidak hanya menjadi ruang interaksi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai infrastruktur informal yang mendukung keberlanjutan praktik klientelisme (Sinambela, Siregar, & Pranata, 2022).

Dengan demikian, Warkop memperlihatkan paradoks yang jelas: di satu sisi ia menciptakan ruang egaliter melalui interaksi santai antarwarga, tetapi di sisi lain ia juga menjadi medium reproduksi relasi kuasa yang tidak setara melalui praktik patronase yang terinstitusionalisasi secara informal.

Warkop sebagai Ruang Demokrasi dari bawah (*Democracy from Below*)

Warkop dapat dipahami sebagai representasi dari *democracy from below* karena berfungsi sebagai saluran alternatif bagi ekspresi politik warga di luar institusi formal yang cenderung didominasi oleh elite politik (Chatterjee, 2004). Dalam ruang ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam percakapan sosial dan politik secara lebih terbuka, spontan, dan tidak terstruktur. Dalam perspektif Habermas (1989), Warkop dapat diposisikan sebagai bentuk *counter-public sphere*, yakni ruang publik alternatif yang memungkinkan munculnya diskusi kritis di tingkat akar rumput. Fraser (1990) juga menegaskan bahwa ruang publik alternatif berperan penting dalam menghadirkan suara kelompok masyarakat di luar dominasi ruang publik formal. Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa Warkop tidak hanya menjadi tempat interaksi sosial, tetapi juga arena pembentukan opini publik dan diskursus politik masyarakat sehari-hari (Habibi, 2018; Lubis, 2021).

Signifikansi Warkop sebagai ruang demokrasi semakin terlihat dalam konteks menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik formal (Indikator Politik Indonesia, 2023; LSI Denny JA, 2023). Dalam kondisi tersebut, Warkop menjadi ruang di mana opini politik terbentuk secara organik melalui interaksi informal masyarakat. Percakapan yang berlangsung tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan makna politik kolektif yang berangkat dari pengalaman sosial warga. Temuan empiris di berbagai daerah seperti Makassar, Parepare, Surabaya, dan Banda Aceh menunjukkan bahwa Warkop berperan sebagai ruang sosial yang memungkinkan partisipasi politik tumbuh secara natural dari bawah (Ardiansyah, 2021; Rahmawati, 2020; Wijayanti, 2022; Anisaturrahmah & Ubaidullah, 2025). Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa demokrasi keseharian dapat berkembang melalui ruang-ruang informal masyarakat.

Namun demikian, posisi Warkop sebagai ruang demokrasi murni perlu dikaji secara lebih kritis. Meskipun secara permukaan menghadirkan suasana egaliter dan bebas dari struktur formal, ruang ini tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh relasi kekuasaan yang lebih luas. Dalam praktiknya, interaksi di Warkop sering kali mempertemukan logika horizontal percakapan warga dengan logika vertikal kekuasaan politik. Kehadiran elite lokal, tokoh masyarakat, maupun broker politik menunjukkan bahwa Warkop juga dapat berfungsi sebagai arena mediasi kepentingan politik (Berenschot, 2018; Tomsa & Setijadi, 2018). Melalui praktik informal seperti mentraktir, pemberian bantuan kecil, atau pembangunan kedekatan personal, elite politik dapat menciptakan relasi sosial yang bersifat emosional sekaligus transaksional. Relasi tersebut pada akhirnya membentuk utang sosial dan loyalitas personal yang berpotensi memengaruhi preferensi politik masyarakat (Aspinall & Sukmajati, 2016; Kitschelt & Wilkinson, 2007).

Dengan demikian, *counter-public sphere* yang terbentuk di Warkop tidak sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan, melainkan menjadi ruang negosiasi yang kompleks antara partisipasi politik organik dan strategi mobilisasi kepentingan. Oleh karena itu, Warkop merepresentasikan dualisme dalam demokrasi akar rumput: di satu sisi menjadi inkubator kesadaran politik masyarakat, tetapi di sisi lain juga berfungsi sebagai medium reproduksi relasi patronase dan kontrol sosial berbasis kedekatan personal (Berenschot & Aspinall, 2020). Dualisme tersebut menjadikan Warkop sebagai ruang demokrasi yang dinamis sekaligus ambivalen dalam konteks politik Indonesia kontemporer.

Kritik dan Refleksi: Batasan Ruang Demokrasi dan Analisis

Meskipun Warkop sering dipahami sebagai ruang egaliter yang mendukung *democracy from below*, penting untuk memberikan refleksi kritis terhadap berbagai keterbatasan yang melekat di dalamnya. Karakter Warkop yang informal, cair, dan cenderung homogen secara sosial berpotensi membentuk *echo chamber*, yakni ruang interaksi yang lebih banyak memperkuat pandangan yang sudah ada daripada membuka ruang bagi perspektif politik yang berbeda (Fraser, 1990). Selain itu, ketiadaan mekanisme verifikasi informasi yang terstruktur membuat Warkop rentan menjadi medium penyebaran misinformasi politik, di mana validitas informasi sering kali lebih ditentukan oleh kedekatan sosial dan kepercayaan personal dibandingkan akurasi faktual (Habibi, 2018; Lubis, 2021). Dalam konteks ini, ruang publik informal tidak selalu menghasilkan diskursus demokratis yang ideal sebagaimana dibayangkan dalam konsep ruang publik Habermas (1989).

Selain itu, Warkop juga tidak dapat diasumsikan sebagai ruang yang sepenuhnya inklusif. Secara sosial dan kultural, akses terhadap percakapan politik di ruang informal dipengaruhi oleh faktor gender, usia, posisi sosial, dan afiliasi kelompok tertentu (Fraser, 1990). Dalam beberapa konteks lokal, partisipasi perempuan dalam diskusi politik yang lebih serius masih relatif terbatas, sementara kelompok tertentu dapat mengalami marginalisasi secara halus melalui norma interaksi yang berlaku dalam ruang tersebut (Sari, 2018; Sinambela, Siregar, & Pranata, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa egalitarianisme dalam Warkop bersifat kondisional dan sangat bergantung pada struktur sosial masyarakat setempat.

Artikel ini juga memiliki keterbatasan metodologis karena menggunakan pendekatan meta-sintesis literatur. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak berasal dari data lapangan primer, melainkan dari interpretasi terhadap berbagai studi empiris yang telah ada. Meskipun demikian, pendekatan studi kepustakaan tetap memungkinkan identifikasi pola umum, hubungan konseptual, dan variasi praktik politik

informal dalam berbagai konteks sosial (Creswell, 2014; Krippendorff, 2018). Oleh sebab itu, hasil kajian ini lebih bersifat konseptual dan komparatif dibandingkan deskriptif-empiris secara langsung.

Perbandingan antarstudi menunjukkan adanya variasi penting dalam manifestasi politik Warkop di berbagai daerah. Di wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Makassar, dinamika politik di Warkop lebih banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor elite dan jaringan politik yang terorganisasi (Ardiansyah, 2021; Wijayanti, 2022; Tomsa & Setijadi, 2018). Sementara itu, di wilayah lain, relasi politik dalam Warkop lebih bersifat personal dan berbasis kedekatan sosial langsung dengan tokoh masyarakat lokal (Rahmawati, 2020; Anisaturrahmah & Ubaidullah, 2025). Variasi tersebut menunjukkan bahwa Warkop bukan merupakan entitas sosial yang seragam, melainkan ruang politik informal yang sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, serta relasi kekuasaan di masing-masing daerah (Berenschot, 2018).

SIMPULAN

Penulisan ini berhasil mengonseptualisasikan Warung Kopi (Warkop) sebagai ruang politik hibrid yang merepresentasikan kompleksitas demokrasi Indonesia kontemporer. Dengan mengintegrasikan kerangka *street-level politics* dan teori patronase-klientelisme, Warkop ditegaskan memiliki fungsi ganda, yakni sebagai arena diskursus egaliter yang memfasilitasi *democracy from below*, sekaligus sebagai ruang berlangsungnya relasi kuasa yang bersifat tidak setara. Temuan penulisan menunjukkan bahwa fungsi ganda tersebut termanifestasi secara nyata dalam praktik sehari-hari, di mana partisipasi politik warga berdialektika dengan mekanisme mobilisasi dukungan. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah praktik pertukaran simbolik seperti “mentraktir kopi”, yang secara kultural berperan dalam membangun utang budi (*debt of gratitude*) dan menjadi mekanisme penting dalam pemeliharaan jaringan klientelisme di tingkat akar rumput.

Namun demikian, Warkop sebagai *alternative public sphere* memiliki sejumlah keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Meskipun ruang ini memungkinkan munculnya bentuk-bentuk resistensi halus (*subtle resistance*), ia tidak sepenuhnya bebas dari problem struktural. Analisis menunjukkan bahwa Warkop rentan terhadap pembentukan ruang gema (*echo chamber*), penyebaran misinformasi, serta reproduksi batasan sosial tertentu, termasuk eksklusi partisipasi kelompok tertentu seperti perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter egalitarianisme di Warkop bersifat kondisional dan sangat bergantung pada konteks sosial yang melingkupinya.

Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa studi demokrasi Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang mampu menjembatani relasi antara ruang diskursus egaliter dan praktik politik yang bersifat transaksional-personalistik. Secara praktis, Warkop dapat dipahami sebagai “laboratorium politik” informal yang membutuhkan pendekatan literasi dan edukasi politik yang lebih kontekstual dan berbasis keseharian masyarakat.

Sebagai keterbatasan, penulisan ini yang berbasis meta-sintesis literatur belum melibatkan data empiris primer. Oleh karena itu, penulisan selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan etnografi mendalam guna mengamati langsung interaksi politik di Warkop, serta melakukan studi

komparatif berbasis data lapangan antara Warkop di wilayah urban dan regional untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisaturrahmah, & Ubaidullah. (2025). *Diskursus politik di ruang publik warung kopi: Analisis komunikasi politik masyarakat perkotaan*. UIN Ar-Raniry Repository.
- Ardiansyah. (2021). Warkop sebagai ruang politik informal di Makassar. *Jurnal Politik Lokal*, 7(2), 115–130.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Azizah, N. (2024). Ruang informal dan demokrasi kontemporer Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 19(1), 45–60.
- Berenschot, W. (2018). *Informal politics in Indonesia: Patronage and clientelism in a democracy*. Cornell University Press.
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How clientelism varies: Comparing patronage democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Chatterjee, P. (2004). *The politics of the governed: Reflections on popular politics in most of the world*. Columbia University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ekayanta, N. (2022). Warung kopi sebagai ruang publik egaliter dalam praktik demokrasi lokal. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 9(1), 65–78.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25/26, 56–80. <https://doi.org/10.2307/466240>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Habibi, M. (2018). Obrolan warung kopi dan pembentukan opini publik di masyarakat perkotaan. *Jurnal Komunikasi Publik*, 5(2), 101–112.
- Hadiz, V. R. (2010). Localising power in post-authoritarian Indonesia. *The Pacific Review*, 23(3), 365–381. <https://doi.org/10.1080/09512741003624575>
- Indikator Politik Indonesia. (2023). *Laporan survei nasional: Penilaian publik terhadap kinerja demokrasi*. Indikator Politik Indonesia.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (Eds.). (2007). *Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

- LSI Denny JA. (2023). *Laporan survei: Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara*. Lingkaran Survei Indonesia.
- Lubis, A. (2021). Percakapan politik di warkop dan pembentukan opini publik lokal. *Jurnal Komunikasi Politik*, 5(1), 77–92.
- Rahmawati, S. (2020). Warung kopi dan ruang diskusi politik di Parepare. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(3), 211–225.
- Sari, D. (2018). Diskursus warga di ruang publik non-formal: Studi kasus warung kopi di Jawa Timur. *Jurnal Komunikasi dan Demokrasi*, 4(2), 87–98.
- Sinambela, R., Siregar, E., & Pranata, M. (2022). Aktivitas sosial dan pembentukan orientasi politik warga di ruang informal. *Jurnal Politik dan Masyarakat*, 9(1), 33–50.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tomsa, D., & Setijadi, C. (2018). New patronage networks in Indonesian local politics: A case study of Surabaya. *Contemporary Southeast Asia*, 40(1), 1–27. <https://doi.org/10.1355/cs40-1a>
- Wijayanti, R. (2022). Warkop dan pembentukan persepsi publik dalam kontestasi elektoral di Surabaya. *Jurnal Politik Perkotaan*, 2(1), 55–70.

PROFIL SINGKAT

Saya, Arwan Aras, lahir di Kabupaten Mamuju Tengah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan pascasarjana pada Program Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin (Unhas). Sejalan dengan bidang studi tersebut, saya aktif terlibat dalam berbagai diskursus dan praksis politik, khususnya dalam mengamati serta mengawal isu-isu politik di tingkat regional maupun nasional. Minat utama saya berfokus pada dinamika politik informal, terutama peran ruang-ruang sosial non-formal dalam membentuk kesadaran serta partisipasi politik di tingkat akar rumput. Fokus kajian ini menjadi landasan utama dalam penulisan artikel ini.